

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) sampai pada periode pertengahan April 2020 telah menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia, dimana sebanyak 212 negara mengalami penyakit tersebut dan telah menyebar kepada lebih dari 2 juta orang, sebanyak 134.610 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia¹. Wabah penyakit Covid-19 tersebut dapat dinyatakan sebagai musibah internasional karena dampaknya terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Covid-19 sebagai penyakit menular yang mematikan dengan menyebar dengan cepat. Hal ini dapat mudah dialami bagi orang yang memiliki imunitas rendah, sampai saat ini, berbagai ahli pada bidang kedokteran belum dapat menemukan obat vaksin yang dapat menyembuhkan Covid-19.

Upaya untuk menanggulangi penyebaran covid 19 tersebut, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan di peringkat pusat, negeri, dan daerah. Pengendalian Coronavirus memerlukan kepemimpinan yang berkesan, tegas dan berhemat dalam menyelaras, mengurus dan menggerakkan semua kerja dan usaha merentas sektor. Pengurusan kepemimpinan yang berkesan menghadkan penyebaran dan penyebaran virus,

¹ Tajul Arifin dkk, *Proteksi Diri Saat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Hadits Shahih, Jurnal,, Karya Tulis Ilmiah Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020,* <http://digilib.uinsgd.ac.id>

meminimumkan kematian, meningkatkan kemungkinan pemulihan, dan lebih berkesan dalam mempercepatkan pemulihan pesakit yang didiagnosis dengan jangkitan positif.

Penanganan covid selama ini menimbulkan dinamika politik, realitas Dinamika politik dalam penanganannya covid selama ini akan mendorong terbentuknya karakter politik di daerah-daerah di Indonesia, karena selama ini, komunikasi antara pemerintah pusat dan tempatan berhubung pengendalian Covid-19 masih belum diselaraskan dengan baik. Masih terdapat perselisihan pendapat yang kerap di kalangan pegawai pemerintah, menunjukkan bahawa penyelarasan lemah dan menyebabkan kekeliruan kepada orang ramai.

DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang pertama kali tempat penderita terinfeksi covid 19, langsung meneapkan PSBB. Menurut dtaa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia. Dinyatakan bahwa orang yang pertam kali menderita covid 19 adalah berada di Jakarta. Hal ini memungkinkan bahwa penyakit tersebut akan mudah menular dengan cepat kepada setiap orang mengingat kepadatan penduduk di Jakarta sangat tinggi.

Keluarnya kebijakan di Jakarta tersebut memberikan dampak politik di kalangan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Hal yang menjadi sorotan dalam kacamata politik adalah kebijhakan DKI Jakarta yang berbeda dalam penanganan COVID-19. Menurut pengamat politik pemerintah provinsi.²

² Vitalio,.,2020. Peringatan Dini, New Normaldi Indonesia Bisa Prematur. <http://www.merdeka.com>

Kebijakan pemerintah DKI Jakarta menurut Iskandar menjelaskan pengaturan PSBB didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Membatasi aktivitas termasuk cuti sekolah dan cuti kerja. Sekatan ke atas aktiviti keagamaan, sosial dan budaya di tempat dan kemudahan awam. pengangkutan. Aktiviti lain yang khusus berkaitan dengan aspek pertahanan dan keselamatan.

Simanjuntak menilai kebijakan daerah dalam menerapkan PSBB untuk penanganan Covid19 terkesan bermuatan politis, hal dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan Pemprov DKI yang membuat tidak konsisten dan dapat menimbulkan responden negatif dari masyarakat. Nuansa politisasi virus corona oleh Pemprov DKI dijadikan sebagai sarana politik untuk menyalonkan dirinya di pemilihan presiden tahun 2024. Sehingga tidak mengherankan jika dasar pada masa pandemik ini berbedza dengan dasar pemerintah pusat. Manuver politik dari Pemprov DKI dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berbeda dapat membuat masyarakat bingung. Selama ini, pemerintah DKI Jakarta terkesan hanya mengutamakan pada narasi. Istilah PSBB transisi darikebijakan Pemprov DKI sebenarnya sudah tidak diperlukan, oleh karena itu kebijakan PSBB tersebut dapt dihentikan.³

³ Simanjuntak 2020.: PSBB Transisi dan Konsep 'Asal Beda' Anies Lawan Pemerintah Pusat. <http://www.cnnindonesia.com>

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai kebijakan politik dalam penanganan pandemi covid-19 melalui PSBB di Prov DKI Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka untuk mempersempit wilayah penelitian ini, peneliti membatasi pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian ini yaitu bagaimana Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Kebijakan PSBB di Provinsi DKI Jakarta

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari pertanyaan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Dinamika politik dalam penanganan pandemi covid-19 melalui PSBB di Prov DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk beberapa kepentingan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat pada pihak akademik dengan memberikan kontribusi dan menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu politik sebagai penerapan Catur Dharma Perguruan Tinggi, terkhusus tentang kebijakan publik sebagai bahan untuk kajian yang lebih lanjut.

b. Hasil dari penelitian apat bermanfaat menjadi dasta dasar bagi peneliti-
peneliti berikutnya yang juga akan meneliti tentang kebijakan politik
pada bidang kesehatan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

2. Kegunaan praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah,
stakeholder serta anggota dewan perwakilan rakyat di daeah dalam
menyusun kebijakan pemerintah daerah.

b. Menjadi bahan pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang
kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan penyakit COVID-19